



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2025

**Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
selaku PPID Utama Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian RI**



Pengantar



Sebagai jaminan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (PPID Kemenko Perekonomian) terus berupaya secara optimal memberikan layanan informasi publik baik secara langsung (tatap muka) maupun secara *online* yang tersedia pada website PPID Kemenko Perekonomian.

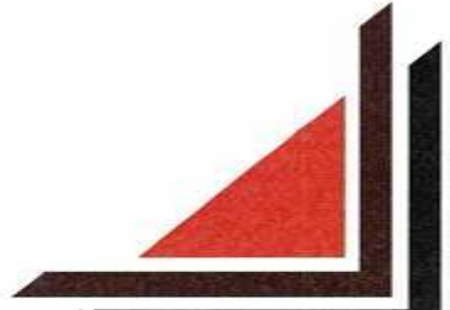
Dengan terus dimutakhirkannya Daftar Informasi Publik (DIP) maupun Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di lingkungan Kemenko Perekonomian sebagai acuan dalam memberikan layanan prima kepada setiap Pemohon Informasi merupakan bentuk komitmen kami dalam menjalankan Maklumat Layanan Informasi Publik di lingkungan Kemenko Perekonomian. Kiranya melalui penyusunan Laporan PPID Tahun 2025 Kemenko Perekonomian ini dapat memberi gambaran menyeluruh atas pemberian layanan informasi publik, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PPID Utama dan PPID Pelaksana.

Jakarta, Desember 2025



Haryo Limanseto

Plt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
selaku PPID Utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI

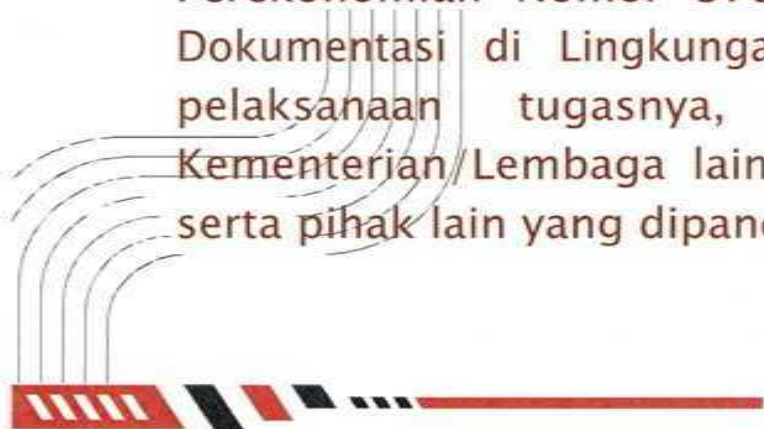




Profil PPID

Latar belakang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (selanjutnya disebut PPID Kemenko Perekonomian) adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 UU KIP terkait penunjukan PPID pada badan publik, serta Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Layanan dan Dokumentasi Informasi di Lingkungan Kemenko Perekonomian.

Untuk mengoptimalkan proses pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kemenko Perekonomian, telah ditunjuk PPID berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 379 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Kemenko Perekonomian dapat melibatkan Kementerian/Lembaga lain, Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, akademisi, serta pihak lain yang dipandang perlu.



Struktur Organisasi PPID

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 379
Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



**Menko Perekonomian
Pengarah PPID**



**Sesmenko Perekonomian
Atasan PPID**



**Plt. Kepala Biro KLIP
PPID Utama**



**Para Sekretaris Deputy & Kabirol HO
Tim Pertimbangan**



Sekretariat PPID Utama



**Kedeputian, Biro, & Inspektorat
PPID Pelaksana**

VISI DAN MISI

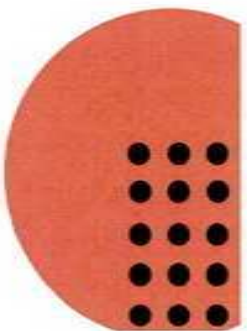
VISI

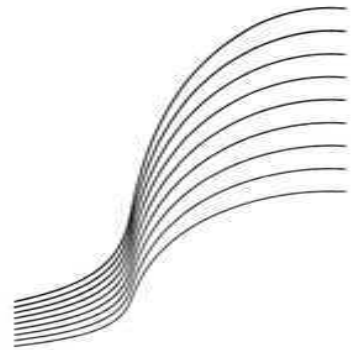
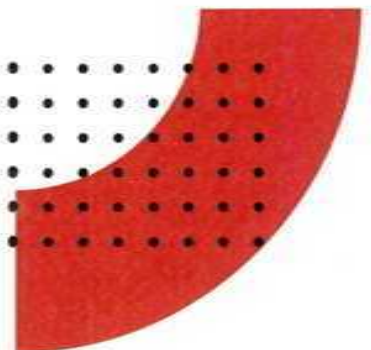
Menjadi PPID yang optimal dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan citra dan reputasi positif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



MISI

1. Memberikan pelayanan, menyediakan, dan menyebarluaskan informasi publik secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan mengenai kebijakan, program dan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik secara baik, benar dan bertanggung jawab, serta menjadi agen perubahan dalam pelayanan informasi publik yang terbuka, transparan dan akuntabel.
3. Melakukan koordinasi ke unit terkait di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam proses penyediaan informasi kepada Pemohon Informasi secara optimal.





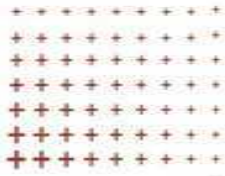
MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID

“Dengan ini kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan keharusan dan melakukan perbaikan secara terus-menerus, serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.”

**PPID Utama,
Plt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan**



Jam Layanan



 KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

**JADWAL
PELAYANAN**
PPID KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN

LURING
Senin s.d. Jumat
09.00 - 15.00 WIB
Gedung Ali Wardhana
JL. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat



 KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

**JADWAL
PELAYANAN**
PPID KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN

DARING
Setiap Saat
email: ppid@ekon.go.id
website: ppid.ekon.go.id



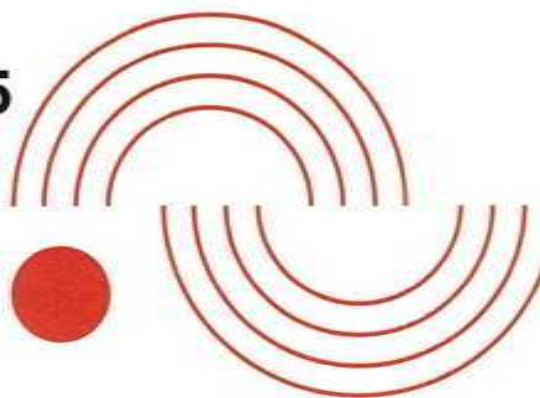
Capaian Prestasi PPID Kemenko Perekonomian



PPID Kemenko Perekonomian kembali meraih predikat Badan Publik Informatif kategori Kementerian pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, 15 Desember 2025. Selain mempertahankan predikat tersebut, PPID Kemenko Perekonomian berhasil mencatatkan peningkatan peringkat dan juga nilai hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diraih dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari peringkat 27 dengan nilai 94,77 (2024) menjadi peringkat 23 dengan nilai 95,47 (2025). Peningkatan ini menunjukkan penguatan kualitas tata kelola informasi publik yang semakin baik, sekaligus mencerminkan efektivitas upaya perbaikan berkelanjutan dalam penyempurnaan kualitas layanan.



Ringkasan Akses Informasi Publik Tahun 2025

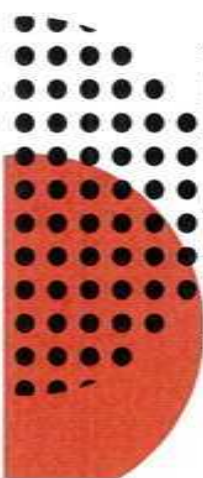


Jumlah Permohonan Informasi

Sepanjang tahun 2025, PPID Kemenko Perekonomian menerima sebanyak 13 permohonan informasi dari Pemohon Individu.

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi

Rata-rata waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi adalah 10 (sepuluh) hari kerja dengan masa perpanjangan 7 (tujuh) hari kerja tambahan.



Jumlah Permohonan yang Dikabulkan atau Ditolak

Dari 13 permohonan informasi itu, sebanyak 9 permohonan dikabulkan dan 4 permohonan ditolak.

Alasan Penolakan Permintaan Informasi

Adapun alasan penolakan atas beberapa permohonan informasi tersebut antara lain karena masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, serta ada informasi yang dimohon tidak dimiliki dan dikuasai oleh Kemenko Perekonomian.



Penerimaan Kunjungan Studi ke Kantor Kemenko Perekonomian Tahun 2025



Universitas Pasundan Bandung (25 Februari 2025)



Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (16 Desember 2025)



Universitas Jayabaya Jakarta (18 Desember 2025)

Rekomendasi

- Mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan sarpras layanan informasi publik yang ramah dan nyaman untuk semua pengguna.
- Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis untuk PPID Pelaksana dan PPID Utama secara berkala untuk meningkatkan kompetensi.
- Memutakhirkan DIP dan DIK serta pengujian konsekuensi sebagai amanat UU KIP.
- Melakukan pengembangan dan pemutakhiran konten informasi publik pada kanal situs maupun media sosial Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.



TERIMA KASIH